



Kekerasan Dalam Keluarga Jadi Pemicu

■ Pemkot Yogya Tekan Tingginya Angka Perceraian

YOGYA, TRIBUN - Seperti tiga dari total angka pernikahan di Kota Yogyakarta selama 2024 berujung pada perceraian. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun berupaya untuk memberikan perhatian serius untuk tingginya angka perceraian ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya, Retnaningtyas, mengatakan, data itu tercatat di sepanjang tahun lalu. Dijelaskan, dari 1.500an pernikahan di Kota Yogya, sekitar 500, atau sepertiganya berakhir talak dan diputus cerai.

Terdapat beberapa faktor yang jadi latar belakang fenomena tersebut. Mulai dari pernikahan di bawah umur karena faktor mental yang belum siap.

Lalu, adanya kekerasan di dalam keluarga, yang beberapa kasus ditangani oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Yogya. "Makanya, pekerjaan rumah pemerintah harus menguatkan dari sisi keluarganya. Kalau keluarganya kuat, insyaallah tidak akan jadi pelaku, tidak akan jadi korban," katanya, Selasa (6/5).

Phaknya pun mencatat, berdasarkan data kekerasan 2024 yang masuk di UPT PPA, terdapat 199 kasus, di mana sebagian besar menimpa perempuan dan anak-anak. Kemudian, selaras data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya di tahun yang sama, terdapat 178 keluarga yang dikategorikan bermasalah secara sosial dan psikologi.

"Kemudian, masih banyak juga keluarga-keluarga yang memiliki anak, yang me-

PERHATIAN SERIUS

- Seperti tiga dari total angka pernikahan di Kota Yogyakarta selama 2024 berujung pada perceraian.
- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun berupaya untuk memberikan perhatian serius untuk tingginya angka perceraian ini.
- Dari 1.500an pernikahan di Kota Yogya, sekitar 500, atau sepertiganya berakhir talak dan diputus cerai.
- Faktor mental belum siap dan kekerasan di dalam keluarga menjadi faktor pemicu.

nikahnya di bawah umur. Kemarin di 2024 itu tercatat ada 27 anak yang mendapatkan dispensasi nikah," ujarnya.

Retna mengatakan, fenomena tersebut tidak bisa selesai pada pernikahan saja. Sebab, ketika tidak mendapat pendampingan yang memadai, akan muncul permasalahan-permasalahan baru di kemudian hari.

Misalnya, terkait perekonomian yang bisa berujung pada kekerasan keluarga, hingga potensi stunting jika pasangan muda-mudi tersebut dikaruniai anak saat kondisinya belum stabil. "Karena belum berpengalaman tetap, karena keduanya masih anak-anak, dampaknya juga akan terjadi kasus kemiskinan baru. Sudah stunting, miskin baru, akhirnya terjadi cekcok," tandasnya.

Oleh sebab itu, dengan rentetan kasus tersebut, tidak mengherankan tren perceraian di Kota Pelajar cenderung cukup tinggi. Namun, kabar baiknya, saat ini masyarakat sudah semakin aware.

Dalam artian, ketika mengalami kekerasan di keluarga, khususnya yang menimpa perempuan, mereka tidak ragu untuk melapor ke kanal-kanal yang telah disediakan pemerintah. "Bukan karena kasusnya yang tiba-tiba bertambah, tidak

Tapi, kesadaran masyarakat untuk oh, saya itu kena kekerasan loh, saya butuh perlindungan loh," ungkapnya.

Prioritas

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogya, Yudianto Dwisutono, berujar, sektor tersebut menjadi salah satu prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan.

Bukan tanpa alasan, ketahanan keluarga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kota Yogya. "Sementara, sekarang ini, kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak cenderung tinggi dari tahun ke tahun," katanya, Selasa (6/5).

Oleh sebab itu, berbagai inovasi pendampingan keluarga ditempuh Pemkot Yogya, salah satunya lewat program Puspagatra Ngetren (Pusat Pembelajaran Keluarga dan Satyagatra Hanga-yomi Kemantren).

Program tersebut, menjadi bagian dari *quick win* Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya. "Ini langkah strategis dan inovatif dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi utama masyarakat yang harmonis dan berdaya," ujarnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005